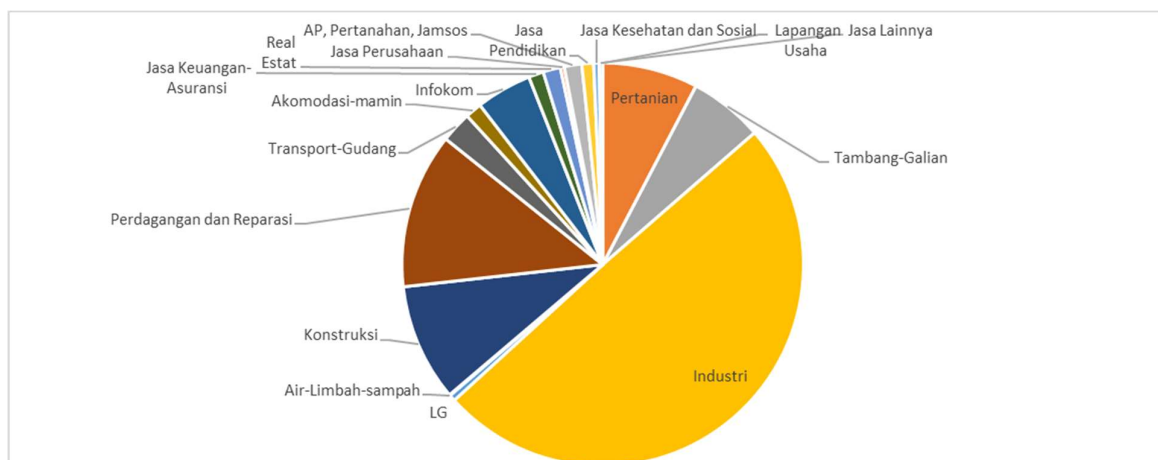


UPAYA MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19¹

Oleh: Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si.²

A. Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019, pandemi yang disebabkan oleh *virus corona disease* (pandemi Covid-19) mengejutkan masyarakat dunia dan mengakibatkan terpuruknya berbagai sektor perekonomian. Upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19 melalui pembatasan aktifitas masyarakat sangat berpengaruh pada aktifitas bisnis dan berimbas pada perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 sebesar -2,07%. Kinerja pembangunan ekonomi lainnya pun turut melemah, seperti naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT), angka kemiskinan hingga rasio gini. TPT nasional pada Agustus tahun 2020 sebesar 7,07%, meningkat tajam dari tahun 2019 yang sebesar 5,28%. Persentase penduduk miskin pada September tahun 2020 sebesar 10,19%, meningkat dari September 2019 yang sebesar 9,22%. Pun demikian dengan Rasio Gini (kesenjangan pendapatan), semula sebesar 0,380 di September tahun 2019 menjadi 0,385 di September tahun 2020.



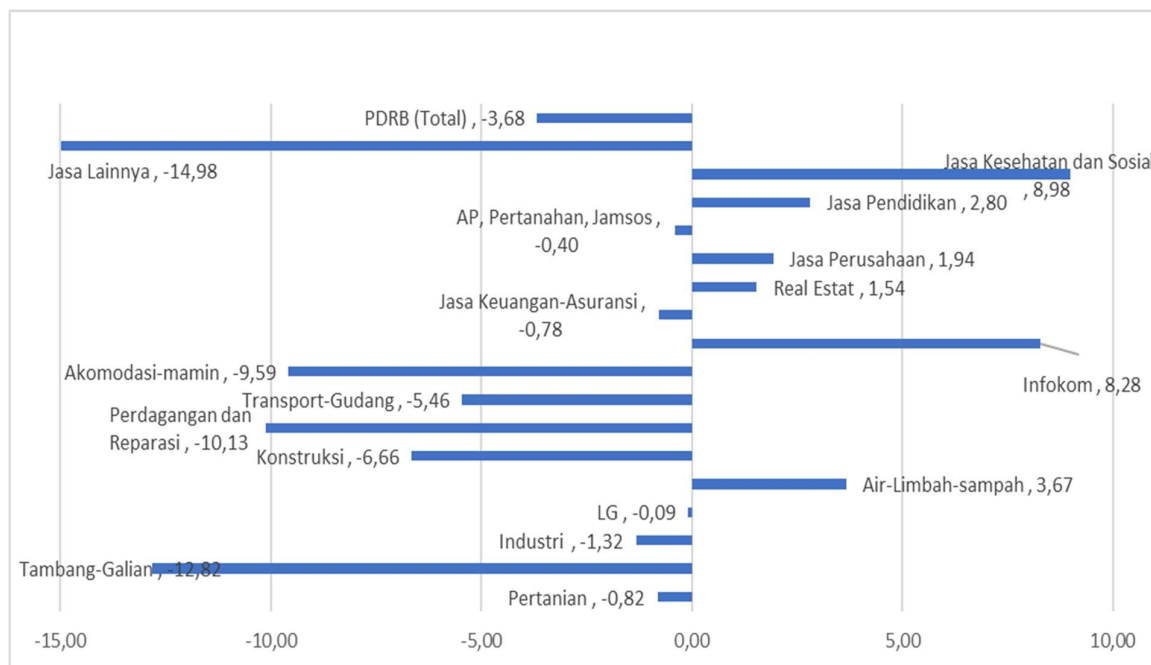
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2021 (diolah).

¹ Kajian yang dipersiapkan sebagai Bahan Diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 15 Maret 2021

² Dosen di Prodi Magister Ilmu Ekonomi dan Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

Gambar 1. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gresik Tahun 2020

Perekonomi semua daerah juga terdampak Pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kabupaten Gresik. Sektor-sektor perekonomian yang tidak bisa dilakukan atau dikurangi karena pembatasan aktifitas sosial masyarakat, seperti pariwisata, perdagangan (*offline*), transportasi, konstruksi, industri, menjadi terpuruk. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Gresik (**Gambar 1**). Karenanya, tidak mengherankan jika pertumbuhan sektor-sektor dominan tersebut berkontraksi hebat (**Gambar 2**) dan diakhir tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sebesar -3,68%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2021 (diolah).

Gambar 2. Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indikator pembangunan lain turut terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statitik Gresik dan Jawa Timur tahun 2019 dan serta Bappeda Jawa Timur Tahun 2020, TPT Kabupaten Gresik tahun 2020 sebesar 8,21%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 5,54%. Pun demikian dengan persentase penduduk miskin yang semula sebesar 11,35% di tahun 2019 menjadi 12,49% di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur, yang

bisa diasumsikan sebagai angka rata-rata kabupaten/kota se Jawa Timur, besaran TPT maupun persentase kemiskinan Kabupaten Gresik relative lebih tinggi. Di tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 5,84%, sementara persentase penduduk miskinnya sebesar 11,09%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah sepantasnyalah jika upaya menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Gresik menjadi agenda yang sangat urgen. Upaya tersebut bukan hanya untuk memulihkan perekonomian, namun juga mengembakannya untuk mengejar ketertinggalan dengan kondisi ekonomi rata-rata di Provinsi Jawa Timur. Tulisan ini menguraikan model/strategi pengembangan ekonomi yang bisa dilakukan oleh setiap *stakeholders* pembangunan, khususnya pemerintah daerah, dalam melakukan upaya tersebut. Strategi tersebut dirumuskan melalui analisis konten berbagai literatur atau data sekunder dari studi pustakan.

B. Pelajaran Penting dari Mereka yang Bisa Bertahan

Dibalik dampak negatif Covid-19, ada pelajaran yang dapat dipetik. Meskipun banyak sektor ekonomi yang terpuruk, namun di sisi lain ada pula yang justru mendapatkan berkah. Beberapa lembaga konsultasi ekonomi dan keuangan, seperti Dcode Economic & Financial Consulting dan Inventure, memperlihatkan kelompok sektor-sektor ekonomi yang berpotensi “kalah”, “menang”, dan “berada di antara keduanya” dalam kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat tinggal di rumah atau membatasi aktifitas di luar. Sektor pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi dan *real estate*, industri, keuangan, pendidikan, hiburan serta sektor lain yang identik dengan kerumuman orang merupakan sektor yang “kalah”. Di sisi lain, sektor kesehatan dan layanan medis/perawatan kesehatan, industri makanan jadi, teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan elektronik, jasa antar-jemput/logistik, serta sektor lain yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang memilih tinggal di rumah, mengalami peningkatan permintaan dan menjadi sektor yang “menang”. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa perilaku ekonomi konsumen/masyarakat akan bergeser karena kondisi yang ada. Sektor-sektor ekonomi yang mampu bertahan adalah sektor yang mampu melayani kebutuhan terkini masyarakat.



Sumber: dcodeefc.com, 2020

Gambar 3. Sektor “Menan” dan “Kalah” selama Pandemi Covid-19

Pelajaran penting lain yang dapat dipetik dari dampak pandemi covid-19 adalah dari perilaku para produsen yang mampu bertahan menghadapi kondisi ini. Para produsen atau penyedia barang/jasa di sektor-sektor yang “menang” dalam kondisi pandemi covid-19 tentu saja akan mendapatkan berkahnya. Namun, yang menarik adalah tidak sedikit pula para produsen yang beralih profesi atau sektor ekonomi untuk dapat bertahan. Tidak sedikit berita di media mengisahkan bagaimana seorang yang sukses membaca dan memanfaatkan keadaan untuk dapat mempertahankan usahanya. Para pemandu wisata beralih profesi menjadi kurir atau penyedia jasa antar jemput, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sukses beralih menjadi penjual pulsa/paket data, pengusaha konveksi yang semakin sukses karena beralih menyediakan masker atau alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan saat pandemic covid-19, atau para artis yang beralih menjadi *youtubers* atau berbisnis makanan siap saja karena bisnis hiburan yang sedang sepi, merupakan sedikit contoh bagaimana para pelaku ekonomi ini bisa bertahan. Kemampuan membaca situasi, termasuk kebutuhan masyarakat/konsumen terkini, dan kemudian kreatif untuk memanfaatkannya dengan baik telah membuat para pelaku ekonomi tersebut bisa tetap produktif.

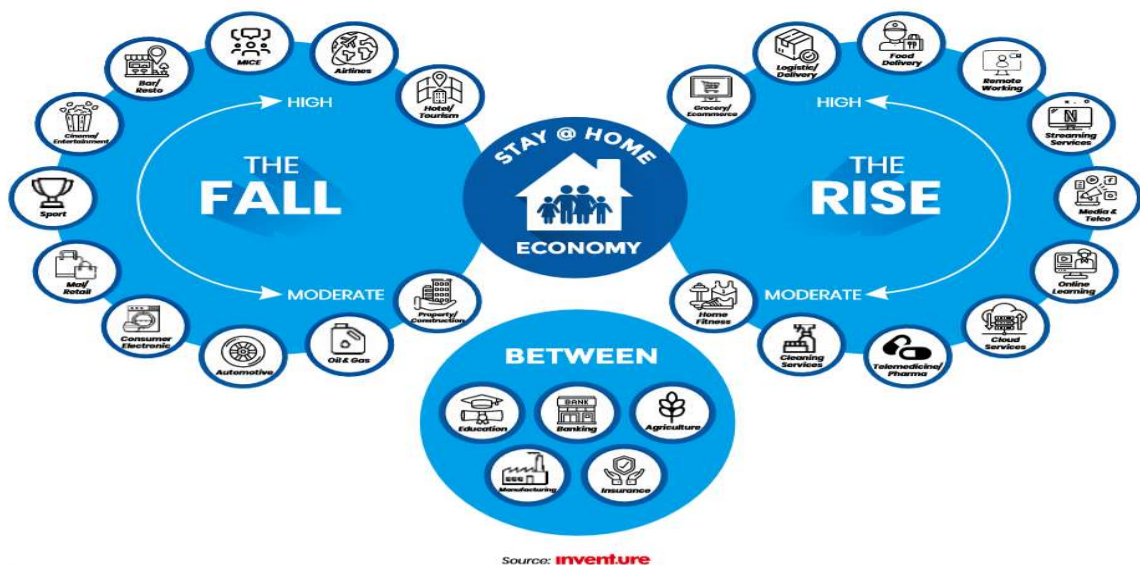
C. Kreatifitas dan Inovasi: Syarat Perlu Bisa Bertahan

Kemampuan-kemampuan untuk menyesuaikan diri agar tetap sukses saat lingkungan/kondisi berubah inilah yang perlu dimiliki dan dilatihkan pada setiap pelaku ekonomi, tidak terkecuali para produsen atau pelaku usaha ekonomi. Beberapa pelaku ekonomi mungkin dengan mudah dapat menyesuaikan diri dan segera menyesuaikan metode atau cara berbisnisnya berdasarkan pengalamannya selama ini. Walau pun demikian, tidak sedikit yang tidak bisa menyesuaikan diri dan akhirnya terpuruk selama pandemic Covid-19. Karenanya, kemampuan-kemampuan mengatasi permasalahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada perlu diperkenalkan, dilatihkan dan ditanamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan ekonomi.

Kemampuan mengatasi permasalahan menuntut kreatifitas sehingga orang yang loha mengatasi permasalahan identik dengan orang kreatif. Setiap manusia pada dasarnya kreatif, namun dalam tingkat yang berbeda sehingga kreatifitas perlu dilatihkan. Kreatifitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mewujudkan suatu ide baru, ada di setiap diri manusia dan menjadi sifat pembeda dengan makhluk lainnya. Seperti pepatah "ala bisa karena biasa", kreatifitas dapat dibangkitkan dan dikembangkan. Output baru dari proses kreatif adalah inovasi yang bisa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, metode/cara, barang/jasa, teknologi, penemuan, dan lain-lain yang baru keseluruhan atau sebagian. Semua orang bisa kreatif untuk berinovasi dengan kemauan dan latihan sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

Orang yang sukses adalah orang yang kreatif. Dalam beberapa referensi, orang kreatif dicirikan oleh kepemilikan rasa ingin tahu yang tinggi, terbuka dan mau menerima pembaharuan, berani mengambil resiko dan selalu bersemangat. Karenanya, tidak mengherankan jika seorang yang kreatif akan selalu belajar atau mencari tahu, mau dan berani mencoba hal yang baru, serta gigih. Ciri-ciri orang seperti inilah yang akan mampu berkontribusi dan menyelesaikan permasalahan diri serta lingkungannya. Karenanya, untuk menyelesaikan dampak negatif pandemic covid-19, maka siapa pun yang terlibat harus mulai mencari tahu kondisi apa yang sedang terjadi serta apa dan bagaimana peluang dan tantangannya. Setelah itu, buka pula wawasan untuk munculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta mencoba dan terus mencoba mengimplementasikan ide-ide tersebut.

Mencari tahu pergeseran perilaku masyarakat serta kebutuhan-kebutuhannya di masa mendatang setelah adanya pandemi covid-19 merupakan cara awal untuk memunculkan ide-ide baru menanggulangi dampaknya. Para ahli memprediksi bahwa pandemi covid-19 tidak akan hilang dari muka bumi sehingga manusia lah yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Karena kemudian muncul konsep *the new normal life*, yaitu bagaimana menjalankan kehidupan normal/seperti biasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat tetap sehat dan bertahan di kondisi pandemi sekali pun. Tidak sedikit survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk mengetahui kebutuhan konsumen/masyarakat di masa kini atau mendatang. Jika dibutuhkan dan mau, siapa pun dapat mengumpulkan data serupa melalui survei atau penelitian lainnya. Cobalah cari tahu dan membuka wawasan. Hasil survei atau penelitian ini merupakan data atau informasi penting untuk memunculkan ide tentang apa yang bisa disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi peluang-peluang usaha/bisnis yang bisa dicoba untuk diimplementasikan di masa kini dan mendatang.



Sumber: [inventure.id](https://www.inventure.id), 2020

Gambar 4. Dampak Pandemi Covid-19: Pergeseran Perilaku Masyarakat

Penyelesaian permasalahan harus dilakukan dari masalahnya sehingga dapat teratasi dengan tuntas. Untuk itu, mencari tahu akar masalah sangat penting. Misalnya, pada kasus terpuruknya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), benarkah pandemi Covid-19

berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang/jasa UMKM yang ada ataukah lebih karena beralihnya perilaku konsumsi ke arah *stay at home economy*? Bagi masyarakat yang pendapatannya menurun akibat pandemi Covid-19, maka daya beli mereka pasti akan menurun. Namun, bagi masyarakat yang pendapatannya relatif tetap, maka perubahan perilaku konsumsi ke arah *stay at home economy*-lah yang menyebabkan berkurangnya konsumsi terhadap barang/jasa yang biasanya mereka dapatkan melalui interaksi langsung. Permasalahan yang sama namun dengan akar masalah yang berbeda akan menuntut penyelesaian yang berbeda pula. Jika akar masalahnya adalah menurunnya daya beli akibat pendapatan yang menurun, maka solusi pemberian subsidi/bantuan langsung tunai atau pun pengurangan pajak penghasilan atau barang/jasa bagi masyarakat terdampak mungkin akan sangat membantu. Namun, jika akar masalahnya adalah karena adanya pergeseran perilaku konsumsi ke arah *stay at home economy*, maka metode pemasaran barang/jasa UMKM harus diubah ke arah yang sesuai dengan kebutuhan aktifitas ekonomi tersebut. Dengan demikian, mencari tahu menjadi langkah pertama yang harus dilakukan saat mencoba mencari upaya menyelesaikan permasalahan, termasuk menggerakkan perekonomian masyarakat selama pandemic Covid-19.

Setelah mencari tahu dan menemukan akar permasalahan, kreatifitas kembali diperlukan untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Ide tidak selalu baru sepenuhnya, namun dapat diperoleh melalui modifikasi sebagian atau keseluruhan ide yang ada sebelumnya. Saat ide-ide dapat direalisasikan, khususnya untuk ide yang baru sebagian atau keseluruhan, maka inilah yang disebut dengan inovasi. Apa yang telah dilakukan oleh mereka yang bisa bertahan dan bahkan mendapatkan berkah selama masa Pandemi Covid-19, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan contoh bentuk kreatifitas dan inovasi penyedia barang/jasa.

Banyak contoh lain kreatifitas dan inovasi anak bangsa untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Tidak sedikit pihak yang mengadakan lomba atau aktifitas yang mendorong semua pihak berkreasi dan berinovasi, salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Penghargaan IDEathon Innovation Covid-19 Tahun 2020. **Gambar 5** memperlihatkan empat dari 17 penerima penghargaan inovasi, yaitu inovasi di bidang ekonomi. Pertama, berbagi tenaga kerja melalui *Market Place Vacan*, di mana sektor “menang” selama pandemic covid-19 dan membutuhkan tenaga kerja “meminjam” tenaga kerja dari sektor yang “kalah”, sehingga

pemutusan hubungan kerja tidak terjadi. Kedua, menghidupkan para pedagang kaki lima dengan berdagang online, di mana para pedagang ini didukasi dan difasilitasi/didampingi untuk mengubah metode berdagang mereka ke sistem *online*. Ketiga, penyediaan aplikasi jualan keliling yang membantu mempertemukan para pedagang yang menjajakan dagangannya dengan konsumen yang membutuhkannya. Keempat, menggalakkan usaha berskala mikro dan kecil untuk memproduksi barang/jasa berbasis potensi lokal yang dibutuhkan selama Pandemi Covid-19, misalnya dengan memproduksi jamu herbal.



17 Penerima Penghargaan IDEathon Innovation Covid-19 (IDEathon Indonesai 2020)



4 di antaranya

Sumber: ristekbrin.go.id, 2020

Gambar 5. Contoh Inovasi Hasil Kreativitas Anak Bangsa dalam Menaggulangi Covid-19

Namun, tidaklah mudah memunculkan ide atau berkreasi dan berinovasi. Sesuai pepatah “Ala Bisa Karena Biasa”, maka aktifitas tersebut merupakan keterampilan (*skill*) individu yang muncul jika seringkali dilatih sehingga telah menjadi kebiasaan. Walau pun demikian, bukan berarti tidak bisa diajarkan. Karenanya, beberapa faktor penghalang atau kendala kreativitas para pelaku ekonomi, khususnya yang terdampak covid-19, harus ditemukan untuk selanjutnya dicarikan solusinya.

Ada beberapa kendala umum untuk berkreasi, diantaranya adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakmauan untuk mencari tahu, kesulitan atau tidak mau

berubah, takut menanggung resiko atau keluar dari kenyamanan, dan kurang bersemangat/putus asa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mencari tahu adalah upaya awal yang harus dilakukan untuk memunculkan ide sesuai kebutuhan. Kendala ketidaktahuan ini bisa diselesaikan melalui edukasi sehingga mereka mengetahui dan mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Sementara itu, kendala ketidakmauan, kesulitan berubah, takut menanggung resiko serta kurang semangat dapat diselesaikan dengan pemberian motivasi dan stimulus serta pemberian contoh (*piloting*) keberhasilan pihak lain. Pengenalan metode, cara, kebiasaan atau teknologi baru umumnya dapat diterima oleh masyarakat setelah mereka melihat sendiri “keberhasilan” metode, cara. Kebiasaan atau teknologi tersebut serta didampingi hingga mereka bisa “mandiri”.

D. Urgensi Sinergitas Pentahelix dalam Upaya Menggerakkan Perekonomian Masyarakat

Permasalahan pembangunan, tidak terkecuali dampak negatif covid-19 terhadap perekonomian daerah, tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama semua pihak terkait, yaitu pemerintah, swasta/pelaku bisnis, masyarakat/komunitas, Lembaga/organisasi non profit, dan akademisi. Masing-masing pihak memiliki sumberdaya dan peran tersendiri yang jika berkolaborasi dan bersinergi dalam sebuah kemitraan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan. Kolaborasi lima pihak terkait pembangunan ini dikenal dengan Pentahelix. Lewat kemitraan yang kuat antar pihak tersebut dan iklim yang kondusif, sektor apapun bisa dilakukan baik itu sektor pariwisata, usaha kecil menengah, koperasi, ataupun sektor lainnya. Bahkan, strategi Pentahelix akan menghasilkan gagasan dan ide-ide yang kreatif, inovatif dan berkesinambungan.

Konsep sinergi pentahelix dalam pembangunan ini mensyaratkan bahwa setiap pihak memiliki sumberdaya yang dibutuhkan dalam pembangunan yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Setiap pihak juga memiliki peran tersendiri. Saat kelima pihak berkolaborasi dan bersinergi (berdasarkan konsensus bersama), maka akan ada penggabungan sumberdaya pembangun dengan perannya masing-masing yang saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Karenanya, tidak mengherankan jika strategi pentahelix berhasil dilakukan, pembangunan di berbagai sektor akan berhasil (efektif dan efisien).

Upaya menggerakkan perekonomian masyarakat pun akan berhasil jika ada sinergisitas pentahelix. Berikut ini adalah uraian tentang “siapa” serta “apa dan bagaimana” peran masing-masing pihak yang dapat dilakukan dalam rangka upaya tersebut.

1. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan sesuai kewenangan di daerah otonomnya, meliputi kepala dan wakil kepala daerah beserta seluruh perangkat daerah dan aparatur negara. Sesuai aturan perundangan, maka daerah otonom mencakup kabupaten/kota dan desa. Dengan demikian, seluruh kepala dan wakil kepala daerah, perangkat daerah, kepala desa dan aparatnya merupakan pihak pemerintah, pihak pertama dalam pentahelix pembangunan daerah.

Ada empat peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai *entrepreneur* yang menjalankan suatu usaha/bisnis di daerahnya melalui pengelolaan aset-aset daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah (pendapatan daerah). Pemerintah daerah juga berperan sebagai koordinator pembangunan melalui penetapan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Pemerintah juga berperan sebagai koordinator dalam upaya mengkolaborasikan pihak swasta, masyarakat/komunitas, kelompok/lembaga non profit, dan akademisi dalam proses pembangunan tersebut. Pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Pemerintah daerah memfasilitasi/membantu/memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk berinvestasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di daerahnya. Sementara itu, sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat menciptakan dan mengembangkan usaha atau sektor-sektor ekonomi di daerahnya melalui pemberian stimulus fiskal atau lainnya, sehingga pelaku usaha tetap berada dan berkembang di daerahnya.

Pemerintah daerah memiliki beberapa sumberdaya yang dapat digunakan untuk menjalankan peran-perannya tersebut. Pertama, sumberdaya keuangan daerah yang dapat dialokasikan dan didistribusikan pada pos-pos belanja daerah sesuai kebijakan yang telah dibuatnya. Pemerintah daerah, dengan kewenangannya, dapat mengalokasikan anggaran untuk implementasi program-program pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kedua, para aparatur pemerintah merupakan sumberdaya manusia yang siap melayani masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan. Aset milik pemerintah daerah merupakan sumberdaya modal yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perekonomian daerah. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah dapat membuat kebijakan publik yang mengatur sistem dan tata Kelola pemerintah maupun kehidupan bermasyarakat.

2. *Pelaku Bisnis / Swasta*

Pelaku bisnis merupakan pelaku ekonomi yang menciptakan nilai tambah atau menghasilkan barang atau jasa. Umumnya, pelaku bisnis ini merupakan pemilik modal, baik uang, asset, teknologi maupun jiwa entrepreneur. Sebagai penyedia barang/jasa, pelaku bisnis juga membutuhkan dan merekrut atau sebagai penyedia tenaga kerja.

Pelaku bisnis dapat berskala kecil maupun besar. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), industri Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di berbagai sektor merupakan para pelaku bisnis dalam pentahelix. Berbagai perusahaan penyedia jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, juga tergolong pelaku usaha.

Dalam konteks upaya menggerakkan perekonomian masyarakat, pelaku bisnis ini bisa menjadi sasaran program/kegiatan, khususnya mereka yang terdampak pandemi covid-19. Sementara itu, pelaku bisnis atau perusahaan yang memiliki modal, bahkan *corporate social responsibility* (CSR), merupakan pelaku bisnis yang lebih berperan sebagai penyedia dan pemberi sumberdaya modal dalam proses pembangunan.

yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler menghadirkan infrastruktur TIK. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam program pengembangan UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan yang memiliki peran sebagai bisnis adalah pelaku UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan itu sendiri dan juga perusahaan swasta yang terdiri dari Bank Jateng, Bank Indonesia Semarang, dan PT Telekomunikasi Indonesia Witel Kudus. Pelaku UMKM memainkan peran sebagai penentu strategi dalam mengembangkan bisnis. Pelaku UMKM ini adalah sebagai entitas utama dalam mengembangkan UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan karena mereka menjalankan roda ekonomi melalui usaha yang digeluti. Kreativitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM merupakan modal

utama dan nilai jual 89 utama dari produk yang mereka jual. Kreativitas pelaku UMKM harus selalu ditingkatkan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan bersaing secara global. Dengan adanya model Penta Helix maka dapat menggerakkan para pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan kreativitas, ide, dan ketrampilan melalui kolaborasi yang tercipta dengan berbagai stakeholder. Pada awal pengembangan program, sejumlah kendala masih dihadapi para pelaku UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan untuk dapat mengembangkan usahanya. Di antaranya keterbatasan modal dan akses permodalan bank, sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan modal sendiri. Untuk mengatasi hal ini maka pada tahun 2009 pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM. Sumber dana KUR berasal dari bank pelaksana, dimana bank pelaksana yang dimaksud di sini adalah Bank Jateng, sementara pemerintah bertindak sebagai penjamin atas kredit yang disalurkan. Sehingga dalam program pengembangan program UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan, Bank Jateng memiliki peran memberikan bantuan modal untuk para pengusaha untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk pinjaman kredit

3. *Kelompok / Lembaga / Organisasi non profit yang ada Di Masyarakat*

Kelompok/Lembaga/organisasi yang ada di masyarakat merupakan gabungan dari masyarakat dalam sebuah wadah organisasi, baik formal maupun informal. Sebagai sebuah kelompok masyarakat, pihak ini merupakan pemilik sumberdaya manusia atau sumberdaya lain yang menjadi bidang kerja kelompok ini. Pihak ini seringkali menjadi kelembagaan aksi bersama (*collective action*) yang umumnya memperjuangkan kepentingan anggotanya dan / atau masyarakat. Tidak jarang pula pihak ini memiliki jejaring yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk pembangunan.

Karena sifatnya tersebut, maka peran kelompok/Lembaga/organisasi, yang umumnya adalah organisasi non profit, adalah sebagai penyedia sumberdaya manusia atau barang/jasa lain yang menjadi inti kegiatannya. Pihak ini pun berperan sebagai kekuatan sosial, pelindung anggota dan/atau masyarakat sekaligus menjadi fungsi kontrol atau pengendali dan pengevaluasi berbagai program pembangunan. Kekuatan jejaring yang dimilikinya pun menjadi modal sosial tersendiri dalam pembangunan.

Dalam beberapa tulisan terkait pembangunan sektor wisata, kelompok/Lembaga/organisasi ini seringkali diwakilkan pada media massa. Namun, dalam konteks upaya menggerakkan perekonomian masyarakat atau pun pembangunan yang lain, selain media, pihak ini dapat berupa asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, yayasan,

organisasi masyarakat formal maupun non formal, dan lain-lain yang memiliki kekuatan kelompok masyarakat.

4. Individu masyarakat (*Masyarakat serta Tokoh Masyarakat, Agama maupun Adat*)

Individu masyarakat, baik masyarakat pada umumnya atau pun tokoh masyarakat/agama/adat, seringkali disebut komunitas. Pihak ini umumnya menjadi objek sekaligus objek pembangunan yang akan ditingkatkan kesejahteraannya. Di satu sisi, masyarakat adalah pelaku ekonomi penyedia tenaga kerja, sementara di sisi lain mereka adalah pengguna barang atau jasa (konsumen). Pihak ini, khususnya yang tergolong tokoh agama/ masyarakat/adat, memiliki kekuatan sosial karena mampu mempengaruhi masyarakat. Dalam komunitas di mana ada sosok yang sangat mempengaruhi masyarakat, maka pembangunan di komunitas tersebut harus melibatkan mereka, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan perhatian dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks upaya menggerakkan perekonomian masyarakat, masyarakat adalah konsumen atau pengguna barang atau jasa serta penyedia tenaga kerja. Sementara itu, di komunitas di mana tokoh masyarakat / agama atau adat setempat sangat berpengaruh, maka pihak ini harus dilibatkan dan /atau dirangkul untuk membantu mendapatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pada program yang bertujuan menaikkan pendapatan masyarakat, maka pihak ini menjadi sasaran program tersebut.

5. Akademisi

Akademisi adalah pihak yang dipercaya memiliki atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) sehingga mampu menjadi sumber pemikiran (*Think tank*), konseptor, pemberi ide, maupun penemu. Karena, selain sebagai sumber ide, akademisi menjadi pihak yang berperan sebagai penggerak, pendamping, pelatih atau penyedia keterampilan sumberdaya manusia lainnya. Akademisi pun bisa bertindak sebagai inisiator, koordinator maupun fasilitator. Namun, perbedaannya dengan peran pemerintah adalah pada bentuk/subtansi peran yang diberikan. Umumnya partisipasi akademisi dalam proses pembangunan adalah dalam bentuk kapasitas sumberdaya manusia (pengetahuan dan keterampilannya). Dalam konteks upaya menggerakkan perekonomian masyarakat atau berbagai bentuk pembangunan lainnya, akademisi meliputi civitas akademik di perguruan tinggi, guru ataupun pelaku bidang pembelajaran / pendidikan.

Seiring dengan adanya kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberlakukan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), maka peluang akademisi berkontribusi besar dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat pun semakin besar. Kebijakan MBKM membuat program studi harus menyediakan menu kegiatan pembelajaran di luar program studi/kampus selama maksimal 3 semester yang dapat dipilih oleh mahasiswa di dalam kurikulumnya. Terdapat delapan pilihan kegiatan di luar kampus/program studi, yaitu pertukaran pelajar/mahasiswa, magang, proyek kemanusiaan, proyek independen, riset, kewirausahaan, proyek di desa (kuliah kerja nyata tematik) dan mengajar di sekolah. Dari delapan kegiatan tersebut, kegiatan yang bisa memberikan peluang besar mahasiswa untuk berkontribusi pada penyelesaian permasalahan ekonomi di masyarakat terkait pandemi covid-19 adalah proyek kemanusiaan, proyek desa, kewirausahaan dan riset.

Proyek Kemanusiaan Indonesia yang berupa pelibatan mahasiswa secara sukarela dalam membantu mengatasi bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan seterusnya, termasuk di dalamnya pandemi covid-19. Bentuk pembelajaran ini mengajak mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya sebagai "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kegiatan Wirausaha yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Bentuk pembelajaran ini mendorong mahasiswa mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing serta menangani permasalahan pengangguran. Membangun atau Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) akan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Sementara itu, penelitian / riset di lembaga riset/pusat studi merupakan bentuk pembelajaran yang memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berminat menjadi peneliti melalui magang di laboratorium pusat riset atau menjadi asisten peneliti proyek riset. Jika topik penelitiannya terkait dengan pandemi covid-19 beserta berbagai cara penyelesaian dampaknya, maka tentu saja hasil penelitiannya diharapkan dapat berkontribusi nyata. Dengan demikian, jika mahasiswa dapat mengikuti kegiatan di luar kampus/prodi maka peluangnya untuk

berkontribusi nyata dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, tidak terkecuali dampak pandemi covid-19, juga akan terbuka lebar.

Kontribusi mahasiswa atau kaum akademisi diharapkan dapat menanggulangi pengangguran sebagai dampak pandemi covid-19 pada khususnya dan membantu masyarakat menemukan sumber-sumber baru atau meningkatkan kehidupan ekonomi mereka pada umumnya. Kegiatan proyek di desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan wadah yang sangat sesuai untuk hal ini, khususnya jika dilakukan di desa yang tertinggal. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka proyek desa/KKNT pun diharapkan dalam bentuk yang mampu memberdayakan masyarakat, misalnya melalui pengembangan potensi atau produk-produk unggulan lokal. Konsep pembangunan ekonomi lokal yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, manusia, modal dan sosial setempat (lokal) perlu diterapkan saat KKNT.

Untuk kepentingan tersebut, selain pengetahuan dan keterampilan keilmuan (*hardskill*), kreatifitas serta *softskill* lainnya harus dimiliki oleh mahasiswa. Kreatifitas harus tetap dimiliki dan diterapkan saat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan mereka, termasuk peningkatan perekonomian mereka. Jika diperlukan, khususnya bagi para generasi mudanya, perkenalkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang dipercaya sesuai dengan tuntutan/kebutuhan zaman dan memberikan nilai tambah yang tinggi, dengan tetap mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Seperti yang telah diketahui, ekonomi kreatif adalah salah satu sektor ekonomi yang menggunakan ide atau kreatifitas (sumberdaya manusia) serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor produksi utamanya. Jika pun tetap menggunakan sumberdaya alam, modal dan sosial sebagai faktor produksi dalam aktifitas ekonominya, namun kemampuan pelaku ekonomi kreatif dalam mengelola sumberdaya menjadi hal yang utama sehingga barang/jasa/produk yang dihasilkan mampu bersaing tinggi. Selain itu, dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan, proporsi pemanfaatan kualitas sumberdaya manusia dan sosial dalam proses pembangunan di masa mendatang harus ditingkatkan, sementara proporsi pemanfaatan sumberdaya alam dan modal yang cenderung terbatas harus dikurangi.

Walaupun demikian, mengimplementasikan ekonomi kreatif tidaklah mudah mengingat sumberdaya utama dalam proses ini adalah kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Karenanya, bantuan dan fasilitasi mahasiswa atau akademisi dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun

pemanfaatan TIK sangat diperlukan. Inilah bentuk-bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengangguran atau perekonomian masyarakat.

E. Catatan untuk Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Dalam pembangunan, tidak terkecuali dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, pemerintah selalu dijadikan ujung tombak pelaku pembangunan. Hal ini bisa dimengerti karena sumberdaya yang dimilikinya, pemerintah mampu membuat kebijakan dan mengatur sistem pemerintahan maupun kehidupan dalam masyarakat.

Sejak pandemic Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk mencegah maupun menanggulangi pandemic ini beserta dampaknya. Berbagai bentuk program telah dilakukan serta uang negara sangat besar dikeluarkan untuk membiayainya. Sasaran program adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Berikut ini adalah catatan untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam menentukan bentuk program bantuan kepada masyarakat:

1. *Kedermawanan Vs Pemberdayaan*

Pemerintah telah sering memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat melalui berbagai program dengan tujuan yang berbeda sejak sebelum masa pandemic Covid-19. Saat terjadi krisis ekonomi atau pandemi seperti saat ini, bantuan pemerintah semakin gencar dengan berbagai bentuk di bidang ekonomi maupun sosial. Tidak ada yang salah dengan tujuan pemberian bantuan tersebut sepanjang tepat sasaran.

Namun, bantuan pemerintah setidaknya dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan berupa uang tunai atau kebutuhan sehari-hari yang akan habis untuk konsumsi sehari-hari. Kedua, bantuan dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ketiga, bantuan dalam bentuk fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lain untuk meningkatkan produktifitas. Bentuk pertama cukup efektif menaikkan kemampuan konsumsi masyarakat karenan dengan uang yang didapatkannya, masyarakat dapat langsung membelanjakannya. Namun, di sisi lain bentuk seperti ini umumnya tidak akan berlangsung lama karena bersifat konsumtif yang akan habis di jangka pendek dan

membutuhkan dana yang besar agar bantuan dapat tetap berlanjut, sementara sumberdaya keuangan negara atau daerah terbatas. Berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa bentuk bantuan seperti ini merupakan kedermawanan yang seringkali menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Untuk jangka pendek, bentuk bantuan ini juga cukup efektif untuk memberikan pengamanan sosial bagi masyarakat.

Bentuk layanan kedua dan ketiga lebih bersifat jangka menengah dan panjang karena ditujukan untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia, baik di kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Bantuan ini bersifat investasi, di mana dampaknya tidak bisa langsung dirasakan oleh penerima bantuan. Bantuan berupa stimulus agar masyarakat bisa berdaya dan produktif di kemudian hari. Walaupun demikian, efektifitas program bantuan sangat tergantung kesesuaian bentuk program dengan kebutuhan dan/atau kemampuannya menyelesaikan akar permasalahan yang ada di masyarakat.

Karenanya, program bantuan yang diberikan pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Di jangka waktu yang sangat pendek, program bantuan berupa dana tunai atau pemberian barang konsumsi akan sangat membantu agar masyarakat bisa tetap bertahan. Namun, di jangka waktu yang lebih lama, program bantuan harus mulai diubah ke dalam bentuk yang mampu memberdayakan penerima bantuan.

2. *Menghadapi Pandemi Covid-19 di Jangka Pendek, Menengah, atau Panjang*

Pandemi covid-19 telah berlangsung lebih dari setahun dan telah ada berbagai upaya menanggulangnya. Hingga awal tahun 2021, telah ada upaya menanggulangi pandemi ini melalui pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Saat sebagian besar bahkan keseluruhan masyarakat telah memiliki kekebalan terhadap Covid-19, maka aktifitas sosial dan ekonomi akan kembali seperti semula.

Setidaknya ada tiga masa pandemi Covid-19. Pertama, pandemi di jangka pendek, yaitu saat penyakit mewabah, vaksin belum ditemukan dan masyarakat sangat peduli dan patuh untuk berkontribusi pada upaya pencegahan/penaggulangnya. Masa ini terjadi sepanjang tahun 2020 dan saat ini sudah mulai berlalu. Kedua, pandemic di jangka menengah di mana vaksin sudah mulai ditemukan namun belum bisa mencapai sebagian besar atau keseluruhan masyarakat, namun kesadaran atau kepedulian masyarakat sudah mulai menipis. Pada saat ini seharusnya *the new normal life* harusnya diimplementasikan. Ketigam

di jangka yang lebih Panjang, di mana pandemi sudah dapat dikendalikan. Berbagai bentuk program bantuan harus mempertimbangkan masa ini agar lebih efektif.

Saat ini, Indonesia telah memasuki pandemi jangka menengah di mana masyarakat seharusnya menerapkan the new normal life dalam melakukan aktifitas sosial-ekonominya. Kebutuhan pelaku bisnis atau pun konsumen mungkin juga mulai berubah sehingga perlu “mencari tahu kembali” apa kebutuhan konsumen maupun produsen terkini. Karenanya, inisiasi program bantuan harus didahului oleh identifikasi kondisi dan kebutuhan terkini.

3. Efektifitas Program

Program pembangunan dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hal ini, maka penerima manfaat/sasaran program harus tepat, bentuk atau materi program sesuai kebutuhan dan mampu menyelesaikan akar permasalahan, dan metode/strategi program pun harus tepat untuk mencapai tujuan. Kompleksnya permasalahan dan akar masalahnya serta budaya dan kebiasaan masyarakat yang sangat bervariasi menyebabkan program yang sama belum tentu memberikan efektifitas yang sama jika diimplementasi di lokasi dan/atau sasaran berbeda. Karenanya, untuk menjamin efektifitas, “mencari tahu kembali” siapa sasaran, apa tujuan, kebutuhan masyarakat yang akan dibantu menjadi sangat penting.

Jika ada pilihan program, maka prioritas diletakkan pada program yang bertujuan memberdayakan masyarakat, lebih padat karya, dan memberi kemanfaatan di jangka yang lebih panjang (ada upaya investasi pada sumberdaya manusia dan lainnya). Selain itu, program di sektor yang mampu memberikan efek pengganda ke sektor lainnya tentu akan lebih prioritas dibandingkan dengan program yang memberikan dampak pada lingkup yang lebih kecil.

4. Cakupan Program

Mengkolaborasikan dan mensinergikan banyak pihak dalam pembangunan bukanlah perkara yang mudah. Semakin banyak personil pihak terkait yang harus dikoordinasi, semakin besar pula upayanya. Karenanya, cakupan program pembangunan yang mensinergikan banyak pihak harus pula dibatasi agar lebih efektif. Menyusun dan mengimplementasikan program pemulihan UMKM makanan-minuman akan lebih sederhana daripada program pemulihan UMKM secara keseluruhan. Semakin spesifik sasaran program, semakin mudah

mengidentifikasi dan mengkoordinasi personil yang akan dilibatkan dari setiap pihak dalam pentahelix. Proses perencanaan partisipatif pun akan lebih mudah dilaksanakan saat jumlah pihak terkait tidak terlalu besar.

5. *Pembangunan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan*

Upaya menggerakkan perekonomian masyarakat juga harus mempertimbangkan potensi yang ada. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal secara optimal, baik sumberdaya alam, manusia, sosial maupun modal, akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Tujuan program pun adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (pertumbuhan ekonomi) dan menyediakan lapangan pekerjaan. Walaupun demikian, keberpihakan kepada kelompok miskin/rentan/marginal serta melestarikan lingkungan sekitar harus dilakukan.

F. *Usulan Model Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gresik*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka model upaya menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gresik ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Mengingat sektor dominan perekonomian adalah pada sektor industri dan perdagangan, serta kewenangan pemerintahan kabupaten, maka sasaran pemulihan dan peningkatan ekonomi adalah pada pelaku usaha dan industri mikro. Usulan model (**Gambar 6**). memastikan sinergisitas pentahelix, mengedepankan program yang kreatif dan inovatif, serta tetap mempertimbangkan catatan penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan model di atas, maka penyusunan dan implementasi setiap bentuk program pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik mengikuti tahapan berikut ini:

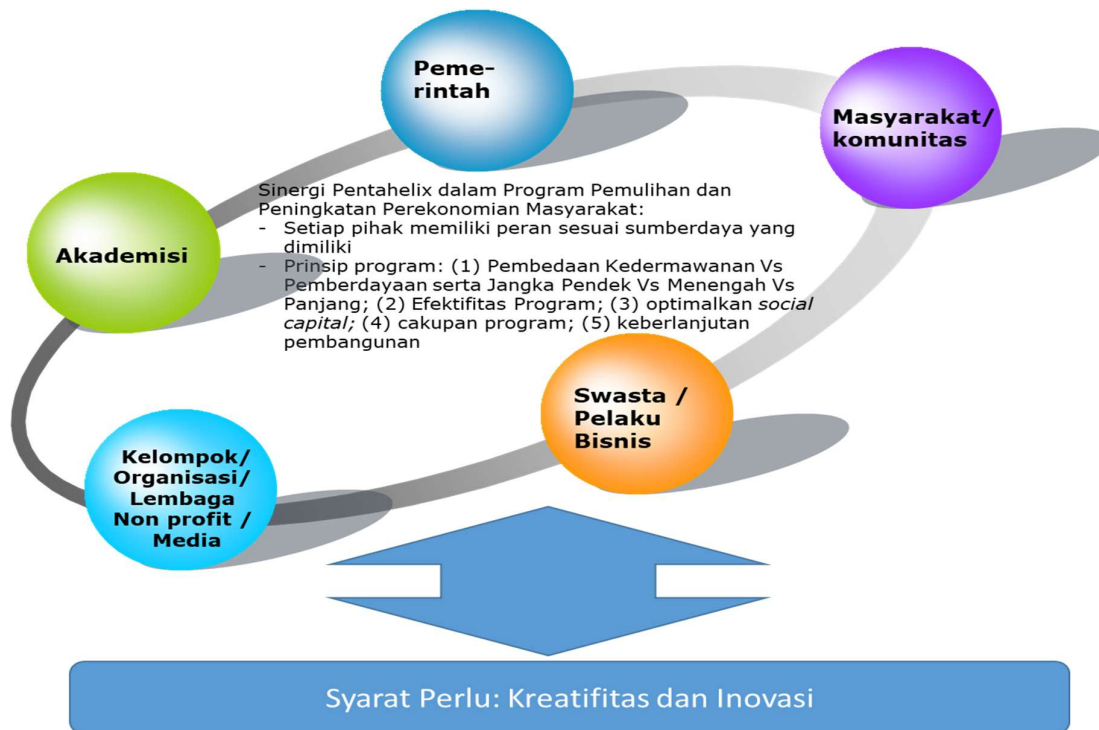
1. Setiap program yang akan dibuat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat harus didahului oleh riset untuk memastikan program sesuai kebutuhan, merupakan alternatif terbaik untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Pemerintah atau akademisi dapat menjadi inisiator dalam tahap ini.
2. Proses perencanaan program yang memastikan adanya kolaborasi dan sinergisitas pentahelix. Melalui perencanaan partisipatif dapat dirumuskan konsensus pentahelix yang seharusnya terlibat. Kesepakatan yang dimaksud meliputi apa yang akan

dikembangkan (penentuan tujuan program beserta indikator keberhasilannya); bagaimana (strategi dalam bentuk program dan kegiatan) yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; siapa melakukan apa dan sumberdaya apa yang harus disiapkan atau dilakukan di setiap tahap proses pembangunan.

Perencanaan program dan kegiatan pun harus komprehensif, yaitu terdapat kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, mengembangkan kelembagaan produksi dan potensi lokal, fasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai stimulus, serta memastikan upaya *income generating* serta pembukaan lapangan pekerjaan. Lebih jauh lagi, program atau kegiatan harus pro-poor, memprioritaskan dan melibatkan pihak paling terdampak dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Aksi Strategis (RAS) disertai indikator kinerja sebagai control. RAS telah disepakati bersama oleh pihak yang terlibat (penahelix) dan siap diimplementasikan.

Terdapat beberapa pendekatan serta instrument perencanaan partisipatif yang bisa dipergunakan dalam menyusun RAS ini. Akademisi bekerjasama dengan pemerintah daerah dapat menjadi inisiator dan fasilitator dalam proses ini. Akademisi lebih pada memfasilitasi dari sisi keilmuan/konsep/metodenya, sementara pemerintah daerah mengkoordinir pentahelix dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan selama proses perencanaan.

3. Proses pelaksanaan program / implementasi RAS pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Setiap pihak terkait menjalankan rencana yang telah disepakati bersama. Sebagai koordinator, tetap dibutuhkan unit yang memimpin implementasi rencana. Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sesuai, dapat menjadi *leading unit* implementasi program ini.
4. Proses monitoring dan evaluasi (monev) program dilakukan selama program berjalan atau di waktu tertentu untuk mengevaluasi ketercapaian/keberhasilan program. Monev dapat dilakukan oleh pihak internal (pelaksana) program dalam rangka evaluasi dan perbaikan diri, maupun oleh pihak eksternal. Lembaga/kelompok/organisasi masyarakat/non profit yang memiliki fungsi control dapat menjadi pemonev eksternal dari program tersebut.
5. Tindak lanjut monev. Temuan dan rekomendasi hasil monev menjadi masukan untuk perbaikan kegiatan/program secara berkelanjutan.



Gambar 6. Usulan Model Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gresik

Contoh upaya menggerakkan perekonomian adalah Program Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Makanan dan Minuman (Mamin) di Kabupaten Gresik. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mini riset serta survei pasar oleh pemerintah/akademisi sebagai inisiator dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi terkini, akar masalah, hingga kebutuhan yang sesuai.
- Misalkan, berdasarkan hasil mini riset/survey didapat ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu: (1) penganekaragaman jenis mamin yang diproduksi sesuai selera terkini konsumen dan dapat bertahan lama; dan (2) metode pemasaran yang sesuai dengan selera terkini konsumen yang lebih memilih *stay at home*. Metode pemasaran yang diusulkan adalah pemasaran online dengan sistem pesan-antar.
- Ide diperluas dan diperasionalkan melalui proses Perencanaan Program secara partisipatif untuk menyusun Rencana Aksi Strategis (RAS) Pemulihan usaha mikro Mamin di Kabupaten Gresik

(a) analisis stakeholders/pentahelix menghasilkan daftar personil pentahelix yang akan dilibatkan. Misalnya, dari pemerintah, terdapat Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian. Pihak swasta yang dilibatkan misalnya adalah pelaku UM Mamin sasaran, pelaku usaha menengah-besar/industri Mamin, pihak perbankan yang bisa memberikan modal. Pihak akademisi adalah dosen dan mahasiswa, khususnya yang menjalankan program MBKM. Lembaga non profit yang bisa dilibatkan adalah assosiasi UMKM Mamin di Gresik. Sementara pihak masyarakat dapat diwakili oleh konsumen UM mamin.

- (b) Penyusunan RAS Program yang berupa konsensus pihak terlibat (lihat poin a) tentang tujuan dan sasaran program, daftar kegiatan yang dibutuhkan, sumberdaya yang harus disediakan setiap pihak, siapa melakukan apa, dan kapan dilakukan.

Proses penyusunan RAS menggunakan metode dan instrument perencanaan partisipatif. Proses perencanaan dapat diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UM bekerjasama dengan akademisi.

Contoh bagian Rencana Aksi Strategis hasil perencanaan partisipatif adalah sebagai berikut:

- Tujuan : memulihkan Usaha Mikro Mamin terdampak Covid-19
- Sasaran : UM Mamin yang terdampak (sesuai daftar yang paling terdampak: misalnya 100 unit)
- Indikator kinerja: (1) jumlah UM sasaran yang berhasil dipulihkan;
(2) rata-rata pendapatan UM sasaran

Program/Keg	Penanggung Jawab kegiatan	Sumberdaya yang dibutuhkan dan Pihak Penyedia (siapa melakukan apa)	Waktu pelaksanaan
Pelatihan pengembangan diri/usaha: mencari tahu kebutuhan pasar, menemukan ide kreatif dan berinovasi	Dinas Koperasi dan UM	Dana: dinas UM dan Koperasi; Pelatih/pendamping: akademisi; dana dari CSR: swasta; peserta/sasaran: Masyarakat/UM terdampak di bawah koordinasi assosiasi	Bulan I
Produksi Mamin			
- Pelatihan produksi Mamin dan kreasinya (sesuai permintaan pasar) serta pendampingan	Dinas UMKM dan Koperasi / Disperin (?): pastikan sesuai TUSI		Bulan I-II
- Fasilitasi produksi Mamin hingga pengemasan			Bulan II

	dan tersedia program dalam Renja PD terkait		
Pemasaran Mamin			
- Promosi dan pembukaan jejaring pasar (kantor, perusahaan, kelompok konsumen tertentu) - Pelatihan promosi dan membuka jejaring	Dinas perdagangan? Dinas Perindustrian? Dinas Kop dan UM?	Kerjasama dengan Konsumen: Lembaga pemerintah daerah, perusahaan, pasar, konsumen masy Pelatih dan Materi promosi: akademisi dan dinas perdagangan (?) Penyedia sarpras pemasaran: dinas dan akademisi	Bulan I
- Penyediaan sarpras pemasaran online dan pesan-antar			Bulan I – II
- Pelatihan dan pendampingan pemasaran online dan pesan-antar			Bulan II
Monitoring dan Evaluasi Program	Dinas penanggung jawab kegiatan	Pemonev internal: dinas penanggung jawab; Pemonev eksternal: akademisi, assosiasi	Bulan II

Catatan: (1) selama mengikuti program, UM sasaran bisa diberi BLT. Setelah mampu memproduksi, BLT diberikan kepada yang lebih membutuhkan; (2) “siapa melakukan apa” sesuai konsensus saat perencanaan

G. Penutup

Permasalahan pembangunan, termasuk upaya menggerakkan perekonomian masyarakat pada masa pandemic covid-19, hanya dapat diselesaikan jika setiap pelaku ekonomi kreatif dan inovatif serta dilakukan secara kolaboratif dan sinergi antar pentahelix. Pemerintah daerah, dapat dibantu oleh akademisi, dapat menjadi inisiator, koordinator, fasilitator dan stimulator program ini.

Penyusunan dan implementasi program pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat mengikuti tahapan berikut: (1) Setiap program untuk menggerakkan perekonomian masyarakat harus didahului oleh riset untuk memastikan program sesuai kebutuhan dan menyelesaikan akar masalah; (2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif untuk menghasilkan konsensus pentahelix tentang apa yang akan dikembangkan (tujuan pengembangan), bagaimana (strategi/program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, melakukan apa dan sumberdaya apa yang harus disiapkan/diberikan di setiap tahap proses implementasi program. Perencanaan Partisipatif juga harus memastikan kegiatan-kegiatan dalam rangka program komprehensif, meliputi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan potensi local lainnya, kelembagaan, sarana prasaran yang dibutuhkan, *income generating*, dan *employment*. Program/kegiatan juga harus berpihak pada kelompok miskin/termarjinalkan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, output perencanaan partisipatif harus disertai indikator kinerja sebagai control implementasi program; (3) Proses pelaksanaan program melibatkan pentahelix, sesuai rencana yang telah disepakati bersama; (4) Proses monitoring dan evaluasi (monev) program dilakukan sepanjang program atau di titik tertentu untuk mengukur ketercapaian program; (5) Memastikan menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan kegiatan/program secara berkelanjutan.